

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Alwi, Hasan. 2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Asnawi Rewansyah, Dr., MSc, 2011, *Kepemimpinan Dalam Pelayanan Publik*, Jakarta : STIA-LAN
- Barker, A. 1982. 'Governmental Bodies and the Network of Mutual Accountability', in Barker (ed), *Quangos in Britain*, London: Macmillan, 3-33
- Borgonovi, Elio & Eugenio Anessi, 1997. Accountability and Accounting in Public Administration : a Framework, The 6<sup>th</sup> CIGAR Conference of Local Government Accounting, Paris
- Caiden, N. And Wildavsky, A, 1974. *Planing and Budgeting in Poor Countries*, New Brunswick, NJ : Transaction
- Candra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi, Suwondo, 2013, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Jurnal Administrasi Publik, vol I, No. 6
- Chabib soleh, dkk, 2010, *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Fokusmedia : Bandung*
- Deputi Bidang Pencegahan – KPK, 2015, *Laporan Hasil Kajian Pengelolaan Keuangan Desa : Dana Desa dan Alokasinya*, Penerbit Anti-Corruption Clearing House, Jakarta
- Devas, N. 1997. 'Indonesia: what do we mean by decentralization?'. *Public Administration and Development*, 17, 351-367
- Ellwood, sheila (Autumn 1993) "Parish and Town Councils: Financial Accountability and management", *Local Government Studies* Vol. 19, pp: 368-386
- Flynn, Norman, 1997, *Public Sector Management, 3<sup>rd</sup> Ed.*, London: Prentice Hall
- Hanif Nurcholis, 2011, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Penerbit Erlangga, Jakarta, h.2
- Insukrindo, Mardiasmo and Widayat, W, 1994. *Peranan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Usaha Peningkatan PAD*, KKD, FE UGM, Yogyakarta
- Inu Kencana Syafiie, dkk., 1999. *Ilmu Administrasi Publik* . PT Rineka Cipta, Jakarta, h.82

- Justisia S Maabuat, 2016, *Kebijakan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun 2016 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016*, Makalah, Universitas Samratulangi, Manado
- J. Supranto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta
- Mardiasmo, 2002 *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi : Yogyakarta
- Miftha Thoha, 2008, *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.207
- Nick Devas, dkk, 1987, *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*, Universitas Indonesia
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta,
- Poerwadarminta, 1996, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, h.327.
- R. Bintaro, 1989, *Dalam Interaksi Desa – Kota dan Permasalahannya*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Siagian, 2009, *Pokok-Pokok Pengawasan*, Rineka Cipta, Jakarta, h.107
- Soelaeman, 2009, Moenandar, *Ilmu Sosial Dasar : Teori dan Konsep Ilmu*. Refika Aditama, Bandung, h.132
- Soerjono Sukanto, 1995, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta
- Widjaja, 2003, *Pemerintahan Desa/Marga*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Widjaja, A.W. 1998. *Titik Berat Otonomi Daerah: Pada Daerah Tingkat II*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, Jakarta, h.57
- Victor, M. Situmorang, dan Jusuf Juhir, 1998, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*: Yogyakarta, Rineka Cipta, h.121

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen dan Proses Amandemen pertama-keempat, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Keuangan Desa;

Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa

Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 47 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer Ke Desa Tahun 2015

### **C. Lampiran-Lampiran**

Candra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi, Suwondo, 2013, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Jurnal Administrasi Publik, vol I, No. 6

### **D. Internet**

Tri Antoro, 2016, *Untuk Akses Dana Tranfer 1 M Lebih, Kades Wajib Selesaikan 5 Peraturan Desa*, diakses dari <http://www.wonosobokab.go.id>, pada tanggal 4 Juni 2016

Heru Suyitno, 2016, *Dana Desa Mengalir Lebih Deras ke Wonosobo*, diakses dari <http://www.antarajateng.com/detail/dana-desa-mengalir-lebih-deras-ke-wonosobo.html> pada tanggal 22 Oktober 2016

Suara Merdeka, 2016, *10 Desa Dapat Transfer Rp. 2.4 Miliar*, diakses dari <http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/10-desa-dapat-transfer-rp-24-miliar/> pada tanggal 22 Oktober 2016